

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad, A., Fachrurrazy, M., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir, T. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Azizah, N. (2022). *Buku Ajar Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*.
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*.
- Hutagalung, S. M. (2022). *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Edisi Kedua*. Sinar Grafika.
- Imran Nating. (2004). *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit, Edisi Revisi*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Nuraeni, Y., Judijanto, L., Sufiarina, S., & Sihombing, L. A. (2024). *Hukum Acara Peradilan Niaga: Teori dan Implementasinya di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*.

### Jurnal

- Abdullah, Z., Nainggolan, M., & Ismed, M. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Perampasan Aset Pihak Ketiga Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 2(2), 299-311.
- Adiputri, R. A. F. D., & Aritonang, P. P. (2025). Kedudukan Hukum Harta Bersama Setelah Dinyatakan Pailit Akibat Tindakan Actio Pauliana (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 211 K/Pdt. Sus-Pailit/2019). *Wajah Hukum*, 9(1), 214-225.
- Adriaman, M., & Nurhayati, V. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pada Bank Gagal. *Journal de Facto*, 11(2), 203-218.

- Andja, S. B. H., Simamora, P. H., & Bangun, R. B. (2020). Analisis Yuridis Itikad Tidak Baik Pemohon Pailit terhadap Penyelesaian Utang Piutang (Ditinjau Dari UU No. 37 Tahun 2004). *Jurnal Mutiara Hukum*, 3(2).
- Anggraeny, I. (2018). Peran Pengadilan Niaga Akibat Adanya Kreditur Fiktif Dalam kepailitan. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 1(2).
- Anugraha, V., & Budhiawan, A. (2023). Prinsip Pembuktian Sederhana sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. *Journal of Education Research*, 4(2).
- Anugraha, V., & Budhiawan, A. (2023). Prinsip Pembuktian Sederhana sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. *Journal of Education Research*, 4(2), 742-751.
- Aprita, S., & Mulkan, H. (2023). Masa Depan Kepailitan Dan PKPU Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Urgensi Revisi Uu Kepailitan Dan PKPU Ditinjau Dari Prespektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *UNES Law Review*, 5(4), 2294-2303.
- Aprita, S., & Qosim, S. (2022). Optimalisasi Wewenang Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 192-206.
- Ardiansyah, E., Gultom, E., & Sudaryat, S. (2025). Analisis Yuridis dan Praktik Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan & PKPU Berdasarkan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004. *COSMOS: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Teknologi*, 2(4), 832-838.
- Astuti, Y., & Yunita, B. P. (2022). Pelaksanaan Lelang Asset Debitur Dalam Upaya Penyelesaian Pembayaran Hutangnya Kepada Kreditur. *DATIN LAW JURNAL*, 3(2).
- Cristi, E., Sunaryo, S., Wiranata, I. G. A., & Kasmawati, K. (2025). Aspek Hukum Penguasaan Uang Milik Debitur Yang dikuasai Kreditur Dalam Perspektif Prinsip Kepailitan. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(2), 459-475.
- Dewi, P. E. T. (2023). Karakteristik khusus pengadilan niaga Dalam mengadili perkara kepailitan. *Jurnal Hukum Saraswati*, 5(1).

- Disemadi, H. S., & Gomes, D. (2021). Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 123-134.
- Faisalsyah, M. A. A., & Nasution, K. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Tagihan Piutang Kreditur yang Tertolak Pada Tahapan Verifikasi oleh Pengurus dalam Proses PKPU. *Journal Evidence Of Law*, 3(2), 107-116.
- Fhadillah, Z., Ayu Astiti, N. M. Y., Cholil, M., Alfian, M. A., & Aliefia, M. (2023). Problematika Kepailitan Transnasional Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Aset Debitur Pailit. *Notaire*, 6(2).
- Hadibroto, G. O., & Hanifah, M. (2023). Upaya hukum dalam perkara kepailitan. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 3(4).
- Hamonangan, A., Lubis, M. A., Taufiqurrahman, M., & Silaban, R. (2021). Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas. *PKM Maju Uda*, 2(1), 20-34.
- Haniaden, N., & Fitriyah, M. A. T. (2022). Akibat Hukum Debitor yang Tida Menempuh Upaya Hukum Rehabilitasi Setelah Kepailitan Berakhir. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(2), 661-674.
- Haryanto, H., & Calvin, J. (2021). Actio Pauliana Sebagai Upaya Kurator Dalam Kepailitan Berdasarkan Putusan Nomor 61 PK/Pdt. Sus-Pailit/2015. *Binamulia Hukum*, 10(1), 1-14.
- Hindrawan, P., Sunarmi, S., Ginting, B., & Harianto, D. (2023). Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 720-732.
- Hs, F., Manangin, S. A., Nasirun, I. O., & Pasla, D. M. (2024). Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Kepailitan Demi Efisiensi dan Keadilan dalam Penyelesaian Kepailitan dan PKPU. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 5(2), 277-288.
- Iryani, D., & Setiawan, A. F. (2023). Kepastian Hukum Kepailitan Terhadap Pembeli Unit Apartemen yang Beriktikad Baik. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 456-466.
- Ismanto, I. A. E. (2024). Peran Kurator Terhadap Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Pasca Putusan Pailit. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 98-107.

- Ihsan, M. D. N., & Arifin, T. (2025). Perspektif HR Muslim No. 2910 Dalam Proses Likuidasi Pailit Atas Boedel Pailit. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4b), 1662-1674.
- Jalaludin, D., Sidik, G. F., Aula, M. I., & Saebani, B. A. (2025). Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Kinerja Hakim dan Aparatur Peradilan di Indonesia. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(4), 766-781.
- Kamilah, A. (2021). Penerapan Prinsip Actio Pauliana Dalam Kepailitan Dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 7(2), 160-176.
- Mantili, R., & Dewi, P. E. T. (2021). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan. *Jurnal Aktual Justice*, 6(1).
- Melatiningsih, F. N. (2024). Tugas, Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Atas Harta Boedel Pailit Debitor. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 2771-2780.
- Mulyatno, A. D. (2022). Kewenangan Kurator Untuk Mengurus Perseroan Terbatas Pailit. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1(2), 155-178.
- Nyaman, R. S., & Dewi, C. I. D. L. (2023). Prosedur Hukum Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Saraswati*, 5(2).
- Pradipto, N., Kartika, C. R., & Kusuma, A. J. (2022). Pemberhentian terhadap direksi perseroan terbatas dalam kepailitan melalui circular resolution. *Jurnal Suara Hukum*, 4(1), 86-106.
- Prayindra, A. R. P., & Anand, G. (2020). Lawsuit Against the Personal Assets of the Directors of Limited Liability Company into Bankrupt Asset. *Talent Development & Excellence*, 12(2).
- Prawira, M. S. N. (2021). Pertanggungjawaban Kurator Karena Menyebabkan Timbulnya Kerugian Dalam Pemberesan Harta Pailit. *Dinamika*, 27(5), 662-678.
- Putri, G., Fionita, J., & Matheus, J. (2024). Lelang Eksekusi Kepailitan atas Tanah dan Bangunan yang Dimiliki Bersama oleh Pihak Ketiga dan Debitur Pailit. *Jurnal Supremasi*, 1-15.

- Putri, S. M., & Rustam, M. R. (2025). Tinjauan Hukum Terhadap Jaminan Harta Pihak Ketiga dalam Kepailitan yang Dijadikan Harta Pailit Oleh Kurator. *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 2(1), 13-25.
- Raharja, N. B., & Gunardi, A. (2023). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2).
- Ranovianto, A. R., & Lyanthi, M. E. (2024). Tanggung jawab perdata atas Tindakan lalai kurator dalam kepengurusan harta pailit (Boedel Pailit). *Journal Publicuho*, 7(3), 1054-1064.
- Rahmawati, P., & Rizkiyanti, W. (2023). Insolvency test sebagai solusi preventif dalam konstruksi hukum kepailitan di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 10(2), 95-112.
- Riswandi, I., & Salamiah, S. (2022). Aspek-Aspek Hukum Tentang Permohonan Pernyataan Pailit. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 14(1).
- Saleh, M. (2024). Kurator Sebagai Eksekutor Dalam Penyelesaian Kasus Kepailitan. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 9(1), 41-53.
- Sidharta, I. (2018). Pembuktian Sederhana Dalam Putusan Pailit (Studi Kasus Perkara Nomor 515 K/Pdt. Sus/2016). *Jurnal Legal Reasoning*, 1(1).
- Sidauruk, S., Widiarty, W. S., & Saragi, P. (2025). Tinjauan Yuridis Pembayaran Imbalan Jasa Kurator atas Suatu Kepailitan yang Telah Dibatalkan. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(5), 1365-1382.
- Sigit, R. N. (2023). Bagaimana Penyelesaian Kasus Terhadap Debitur Pailit Melalui Pelelangan Yang Dilakukan Oleh Kurator?. *DATIN LAW JURNAL*, 4(2).
- Sianturi, M., Iryani, D., & Setiawan, P. A. H. (2023). Tugas, Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Kepailitan. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 14(6), 751-760.
- Simanjuntak, S. P. L. A. (2023). Dissenting Opinion Dalam Perkara Kepailitan: (Studi Putusan No. 42/Pdt. Sus-Pkpu/2021/PN Niaga Mdn). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 663-673.
- Singal, N. Y. (2022). Kajian Hukum Tanggung Jawab Kurator Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Pasca Putusan Pengadilan Niaga. *Lex Privatum*, 10(1).
- Situmorang, F., Sinaulan, R. L., & Ismed, M. (2023). Kajian Hukum Tentang Kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Atas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 22(2).

- Sirait, P., Junaidi, M., Sudarmanto, K., & Sofyan, S. (2023). Pencabutan Putusan Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan. *Jurnal USM Law Review*, 6(3), 1279-1294.
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8).
- Warsito, L. (2024). Urgensi Pembuktian Syarat Kepailitan Dan Tes Insolvensi Dalam Permohonan Kepailitan. *Jurnal USM Law Review*, 7(2).
- Wardani, W. Y. (2024). Problematika Kepailitan dan Pembubaran Bumn Persero Serta Perlindungan Hukum terhadap Kreditor. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 6(2), 190-201.
- Wulandari, M. D., Qahar, A., & Hasbi, H. (2025). Tinjauan Hukum Dalam Proses Kepailitan Terhadap Kedudukan Kreditor Dan Debitur Guna Pemenuhan Hak Atas Aset Boedel Pailit. *LEGAL DIALOGICA*, 1(1).

### **Skripsi/Thesis**

- MUBAROQ, M. (2023). Rekonseptualisasi Materi Hukum Kepailitan untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Berbasis Asas Keseimbangan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Rustam, A. (2022). Pembuktian Secara Sederhana Sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Standard Verification As Suspension Of Payment (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).

### **Peraturan**

- Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentan Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Hutang
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (“UUK”)
- Perppu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan
- Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Hutang